

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia sekarang tengah menggalakkan masalah pembangunan infrastruktur. Ditandai dari beberapa tahun belakangan ini, terdapat banyak proyek pembangunan fasilitas umum yang dibangun lebih *advanced* demi memenuhi mobilitas masyarakat. Keberhasilan pembangunan infrastruktur di Indonesia juga tak lepas dari usaha dan karya para perusahaan di bidang usaha jasa konstruksi. Tentunya para perusahaan di bidang usaha jasa konstruksi tersebut merupakan perusahaan yang telah memiliki pengalaman dan sertifikasi, serta bertanggung jawab penuh atas eksekusi rencana pembangunan yang berlangsung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2011 dalam paragraf 4 dijelaskan bahwa ada 3 kategori jenis usaha di bidang konstruksi yaitu Perencana Kontruksi, Pengawas Konstruksi dan Pelaksana Konstruksi. Pada umumnya tahapan dalam sebuah kegiatan konstruksi, dimulai dari tahap perencanaan yang dilakukan oleh pihak konsultan konstruksi. Kemudian pembangunan tersebut dilakukan oleh pihak kontraktor yang bertindak sebagai pelaksana konstruksi dan selama pelaksanaan konstruksi berlangsung dari tahap awal sampai konstruksi tersebut selesai, pembangunan tersebut akan diawasi langsung oleh pihak konsultan konstruksi yang bertindak sebagai pengawas konstruksi.

Walaupun ketiga jenis usaha jasa tersebut sama-sama dibidang jasa konstruksi. Namun pedoman untuk aturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangannya berbeda-beda. Terkait perusahaan konsultan konstruksi yang bertindak sebagai pihak perencana dan pihak pengawas di dalam sebuah konstruksi, Dewan Ikatan Akuntan Indonesia mengaturnya dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23 tentang pendapatan dalam kategori perusahaan jasa. Namun untuk perusahaan konstruksi atau kontraktor yang bertindak sebagai pihak pelaksana di dalam sebuah konstruksi, Dewan Ikatan Akuntan Indonesia mengaturnya khusus dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 34 tentang kontrak konstruksi.

Dalam pendapatan ada pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan. Salah satu permasalahan dalam penerapan akuntansi pendapatan yaitu pada saat pengakuan pendapatan. Dalam mengakui pendapatan perusahaan harus dilakukan secara akurat untuk menghindari kesalahan oleh para pemakai laporan keuangan dalam memprediksi kemampuan perusahaan dan juga untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Inti dari permasalahan pengakuan pendapatan adalah menentukan kapan suatu penghasilan dapat diakui oleh pihak perusahaan. Sehubungan dengan transaksi dari penjualan jasa jika dapat diestimasi dengan andal maka pendapatan baru dapat diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode. Tentunya tingkat penyelesaian dari transaksi tersebut dapat ditentukan dengan berbagai metode. Entitas menggunakan metode yang dapat mencerminkan jasa yang diberikan.

PT. Bina Karya (Persero) adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Jasa Konsultan Konstruksi. Metode pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh PT. Bina Karya (Persero) yaitu menggunakan metode *accrual basis*. Dimana perusahaan dapat mengakui pendapatan walaupun pihak pemberi kerja atau pengguna jasa belum melakukan pembayaran dan dalam mengakui pendapatan jasa konsultan konstruksinya pun perusahaan mengakui pendapatan sebesar prestasi kerja yang dilakukan. Alasan penulis memilih PKL di perusahaan ini adalah karena tempat PKL penulis merupakan salah satu perusahaan BUMN dan dalam kegiatan PKL pun penulis ditempatkan di bagian Keuangan dan SDM sehingga disini penulis dimudahkan dalam masalah pengambilan data maupun dalam masalah pengamatan dari judul yang diambil oleh penulis. Untuk lebih jelasnya lagi penulis pun merasa tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dan kemudian hasilnya akan penulis tuangkan dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul **“Tinjauan atas Pengakuan Pendapatan Jasa Konsultan Kontruksi PT. Bina Karya (Persero)”**.

I.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan Latar Belakang dalam pemilihan judul, ruang lingkup pembahasan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) meliputi tinjauan dan pengamatan tentang pengakuan pendapatan jasa konsultan konstruksi pada perusahaan PT. Bina Karya (Persero) yang dibatasi hanya meliputi dasar pengakuan pendapatan dan beban terkait jasa konsultan konstruksi, pengukuran dan penyajian pendapatan jasa konsultan konstruksi pada PT. Bina Karya (Persero), pencatatan atas pendapatan dari mulai awal kontrak sampai kontrak tersebut selesai, dan penerapan PSAK 23 tentang pendapatan pada kategori perusahaan jasa. Pengakuan pendapatan yang digunakan pada PT. Bina Karya (Persero) menggunakan metode *accrual basis*.

I.3 Tujuan

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini berisikan penjabaran topik yang diambil berdasarkan pengalaman selama menjalani program PKL di PT. Bina Karya (Persero) yang dikaitkan dengan teori-teori yang dipelajari selama di bangku kuliah. Topik yang dimaksud yaitu Tinjauan atas Pengakuan Pendapatan Jasa Konsultan Kontruksi Pada PT. Bina Karya (Persero). Adapun tujuan dari penulisan laporan praktik kerja lapangan ini adalah :

I.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi kewajiban seorang mahasiswa untuk mengikuti praktik kerja lapangan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Tugas Akhir dalam program studi Akuntansi Diploma 3 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
2. Menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dari bangku kuliah program studi Akuntansi Diploma 3 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
3. Mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah didapat di bangku kuliah pada kenyataan yang ada di dunia kerja melalui kegiatan praktik kerja lapangan ini.

I.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengakuan pendapatan yang ada di PT. Bina Karya (Persero).
2. Untuk mengetahui penerapan PSAK 23 dalam pengakuan pendapatan jasa konsultan konstruksi yang diterapkan oleh PT. Bina Karya (Persero).

I.4 Sejarah Perusahaan

PT. Bina Karya (Persero) berdiri pada tanggal 13 November 1962 atas keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1962, berbentuk Perusahaan Negara yang diundangkan dalam berita Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1962. Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1970 Perusahaan Negara berubah menjadi Perusahaan Perseroan dan berdasarkan perubahan terakhir anggaran dasar dari Notaris Abdul Hamid tanggal 21 Mei 2003 Nomor 10 tentang pernyataan pemegang saham dan perubahan anggaran dasar bahwa modal dasar perusahaan mengalami perubahan dari Rp. 75.000.000 menjadi Rp. 10.912.000.000. Pada awal berdirinya perusahaan hanya menangani bidang arsitek dan bangunan, namun dengan berkembangnya lingkungan bisnis yang semakin meluas maka pelayanan yang diberikan juga ikut mengalami perkembangan dan saat ini telah menjadi perusahaan yang mampu menangani Jasa Konsultansi multi disiplin teknik dan manajemen secara luas. Kantor pusat PT. Bina Karya (Persero) beralamatkan di Gedung Tamansari Hive Office lantai 9, Jl. D.I. Panjaitan Kav.2, Cawang - Jakarta Timur 13340.

a. Visi Perusahaan

Menjadi Perusahaan Jasa Konsultasi dan mitra bisnis yang kreatif dan inovatif serta unggul secara global.

b. Misi perusahaan

- Menjadi perusahaan konsultan BUMN yang mampu memberikan pelayanan jasa konsultansi terpadu dan pengembangan manajemen yang bermutu, tepat waktu dan kompetitif.

- Mengembangkan *human capital* dan peningkatan *financial capital* dalam rangka membangun kapasitas dan kapabilitas korporasi yang berkesinambungan.
- Mengembangkan multibisnis berbasis industri jasa konsultasi konstruksi melalui usaha investasi, jasa konsultasi, aset manajemen, *energy*, manufaktur yang mampu memberikan nilai tambah pada korporasi dan *stakeholders*.
- Mengembangkan standar mutu & K3 sebagai panduan utama dan moto setiap personil dalam pelaksanaan tugas.

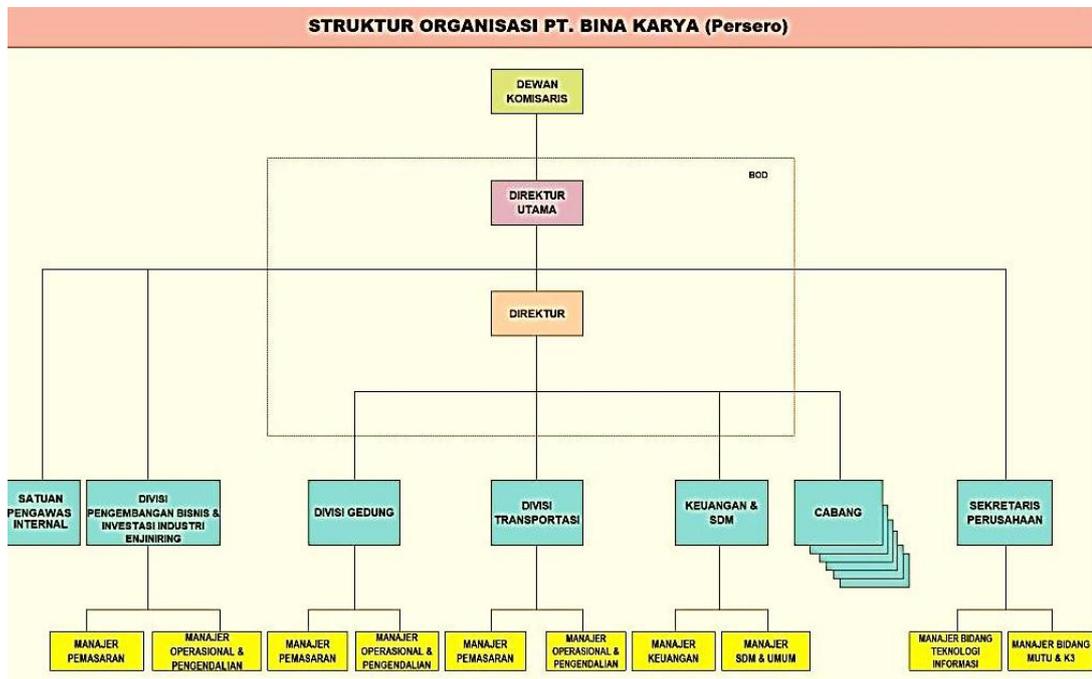
c. Tata Nilai Perusahaan

- **Profesional**
- *Focus Customer*
- **Inovatif**
- *Trust*
- *Integrity*

PROFIT-Integrity



I.5. Struktur Organisasi Perusahaan



Sumber: <http://binakarya.co.id/>

Gambar 1. Struktur Organisasi Perusahaan

1. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Melakukan tugas-tugas dalam bidang pengawasan, penilaian dan pengendalian kegiatan perusahaan.

2. Divisi Pengembangan Bisnis & Investasi Industri Enjiniring

Melaksanakan kegiatan pemasaran, operasional/perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proyek dibidangnya.

3. Divisi Gedung

Melaksanakan kegiatan pemasaran, operasional/perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proyek dibidangnya.

4. Divisi Transportasi

Melaksanakan kegiatan pemasaran, operasional/perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proyek dibidangnya.

5. Keuangan & SDM

Melakukan fungsi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang: keuangan, akuntansi, perpajakan dan tertib administrasi di bidang keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan, pengelolaan gedung kantor pusat, Administrasi (ADM) dan Aset Tetap.

a. Senior Manajer KSDM

1. Dalam Bidang Keuangan

- Membantu Direksi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan
- Memberikan usulan atau masukan kepada Direksi mengenai pengelolaan bidang keuangan perusahaan
- Menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dsb.

2. Dalam Bidang SDM

- Penyusunan seluruh data calon tenaga kerja dan tenaga kerja yang ada (data pribadi, data keahlian, data riwayat pekerjaan dan lain-lain)
- Membuat proyeksi kebutuhan tenaga kerja
- Pengelolaan/penyelenggaraan dari seluruh proses penerimaan/pengangkatan dan pemberhentian tenaga kerja, dsb.

3. Dalam Bidang Umum

- Pengelolaan inventarisasi aset, perlengkapan dan peralatan perusahaan
- Menyusun kebutuhan barang, peralatan kantor, kendaraan dinas dan ruang kantor.
- Pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penghapusan aset perusahaan, dsb.

b. Manajer SDM

Membantu Senior Manajer KSDM dalam pelaksanaan pengelolaan pendayagunaan dan pembinaan sumber daya manusia serta rumah tangga/umum.

c. Manajer Keuangan

Membantu Senior Manajer KSDM dalam pelaksanaan pembukuan sesuai dengan standar PSAK Indonesia dan peraturan perusahaan yang berlaku.

6. Cabang

a. Cabang Medan, berkedudukan di Medan

Meliputi Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau dan seluruh kabupaten di provinsi-provinsi tersebut.

b. Cabang Bandung, berkedudukan di Bandung

Meliputi Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan seluruh Kabupaten di provinsi-provinsi tersebut.

c. Cabang Surabaya, berkedudukan di Surabaya

Meliputi Provinsi NTT, NTB, Jawa Timur dan seluruh Kabupaten di provinsi-provinsi tersebut.

d. Cabang DKI, berkedudukan di Jakarta

Meliputi Provinsi DKI Jakarta, Banten dan seluruh Kabupaten di provinsi-provinsi tersebut.

e. Cabang Makassar, berkedudukan di Makassar

Meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Bali, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan seluruh Kabupaten di provinsi-provinsi tersebut.

f. Cabang Semarang, berkedudukan di Semarang

Meliputi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan seluruh Kabupaten di provinsi-provinsi tersebut.

7. Sekretaris Perusahaan

Melakukan fungsi administrasi dan kehumasan termasuk dalam kaitannya sebagai pelayanan publik, serta kesekretariatan atau tata usaha perusahaan dan penanganan masalah hukum (litigasi/non litigasi dan advokasi) serta pengelolaan di bidang Teknologi Informasi (IT).

1.6 Kegiatan Usaha Perusahaan

PT. Bina Karya (Persero) adalah salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa konsultasi sebagai penyedia Jasa Konsultan multi disiplin teknik dan manajemen yang sepenuhnya didukung oleh peran serta para Tenaga Ahli/Profesional dan Tenaga Terampil dibidangnya. Untuk menghadapi tuntutan akan standar kualitas penyediaan jasa konsultasi yang lebih tinggi PT. Bina Karya (Persero) telah menerapkan standarisasi pelayanan berdasarkan ISO 9001 : 2015 & OHSAS 18001 : 2007 serta prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Karena bagi perusahaan kepuasan *stakeholders* merupakan tujuan utama dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga perusahaan sangat mengutamakan masalah “**mutu dan ketepatan waktu**”. Dengan keunggulan layanan jasa konsultasi, PT. Bina Karya (Persero), mempunyai lingkup usaha yang mencakup bidang:

- Perencanaan Umum
- Desain Teknik
- Pengawasan Konstruksi
- Manajemen Konstruksi
- Manajemen dan Pengembangan Wilayah
- Pengembangan Masyarakat
- Enjiniring
- Pengembangan Bisnis & Investasi Enjiniring
- Survei dan Penyelidikan
- Studi dan Analisis Proyek
- Studi Kelayakan
- Manajemen
- Pendidikan dan Pelatihan
- Penelitian dan Pengembangan

I.7 Manfaat

Penelitian yang dilakukan melalui tinjauan perusahaan ini diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut :

1.7.1 Manfaat Teoritis

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca, serta dapat digunakan sebagai bahan masukan khususnya dengan materi yang berkaitan dengan Tinjauan atas Pengakuan Pendapatan pada Perusahaan Jasa Konsultan Kontruksi.

1.7.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna bagi perusahaan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengetahui sejauh mana perusahaan dalam menerapkan metode dalam mengakui pendapatannya dan apakah dalam mengakui pendapatannya perusahaan telah mentaati ketentuan yang berlaku yaitu berpedoman kepada PSAK 23.

2. Bagi Penulis

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan terutama dalam masalah akuntansi mengenai pengakuan pendapatan, sebagai pemahaman lebih lanjut terhadap perbedaan materi yang diperoleh selama perkuliahan dengan realita yang terjadi di perusahaan serta sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

3. Bagi Universitas

Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi di perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta mengenai permasalahan yang terkait dengan penulisan Tugas Akhir ini.